

TAJUK RENCANA

Aroma Kontestasi Pilpres

MESKI Pilpres 2024 masih lama, namun gerakan politik untuk kearah pencalonan sudah mulai terasa. Aroma pertarungan dalam Pilpres sudah terlihat sekarang. Ada yang terang-terangan sudah mengemukakan akan maju ke Capres 2024, ada yang malu-malu namun terus bergerak menggalang massa. Banyak juga mencoba menarik simpati dengan berbagai cara. Tetapi aksi untuk mencari popularitas sudah kasat mata.

Salah satu yang sudah terang-terangan sudah mencalonkan diri di luar partai, adalah Partai Nasdem. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) belum lama ini, Partai Nasdem merekomendasikan tiga nama calon presiden yang berpotensi bakal di usung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ada 3 nama yang memang populer di mata publik. Masing-masing adalah Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan, Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Meski Ganjar memperoleh usulan terbanyak kedua dari perwakilan DPW setelah Anies, namanya berada di urutan ketiga di bawah Andika. Pemilihan nama itu dimusyawarahkan pimpinan partai hingga mengerucut kepada tiga nama tersebut.

Urutan siapa yang teratas dan nomor dua atau tiga, tidak masalah. Tetapi strategi Nasdem untuk mencalonkan orang di luar partai tentu banyak maknanya bagi partai tersebut. Semua tokoh yang dicalonkan, dekat dengan Nasdem. Ketua Umum Surya Paloh tentu tidak asing dengan Anies. Mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut adalah orang yang membacakan manifesto deklarasi ormas Nasional Demokrat, yang kemudian menjadi partai, pada 1 Februari 2010 lalu. Semula ada nama yang mencuat dari kalangan militer, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dukung Abdurachman. Namun pilihan Surya Paloh, memilih 1 saja Andika Perkasa.

la juga menyatakan pilihan tersebut tidak terburu-buru, tidak ada yang mendesak karena urusan pencapresan adalah urusan partainya. Untuk kepentingan bangsa, agar cermat memilih, katanya.

Namun yang jelas, Partai Nasdem ingin menyatakan bahwa 2024 tetap ada pilihan presiden. Tidak ada lagi untuk memberi dukungan jika ada yang mencoba memperpanjang masa kepemimpinan presiden Jokowi baik ketiga atau ke 2,5 kalinya. 2024 tetap akan ada pemilihan Presiden. Ia menepis jika ada yang ingin memperpanjang jabatan Presiden Jokowi demi untuk kepentingan kekuasaan.

Dari faktor ini saja, Nasdem panen dukungan dari kalangan mayoritas yang menentang isu bakal diperpanjang. Nasdem blak-blakan mencalonkan orang dari luar partai, lantaran menurut Surya Paloh tidak ada dari kalangan internalnya yang untuk maju Capres saat ini, mungkin periode berikutnya. Tentu sudah diperhitungkan matang, dengan mencalonkan di luar partai maka Nasdem bakal mendapat dukungan simpati dari para pendukung tokoh capresnya, yang tidak sedikit jumlahnya. Sebab biasanya, ketika partai mendeklarasikan kaderannya untuk maju capres, sudah dipastikan partai lain akan membuat jarak. Dampaknya dalam perolehan suara akan turun, sehingga Nasdem akan tambah 'musuh'. Termasuk dari kalangan yang selama ini menganggap perlungan presiden dari kalangan militer yang jumlahnya juga tidak sedikit.

Meski demikian Nasdem akan memerlukan koalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung jagoan mereka di pilpres. Pasalnya, Nasdem hanya mengantongi 9% suara parlemen di syarat 20% untuk mengusung capres. Tetapi itulah politik, mundur satu langkah tetapi bisa melompat 5 langkah ke depannya. (**)

Internalisasi Merdeka Belajar

DUNIA pendidikan kerap dihadapkan dengan berbagai polemik kebijakan yang memberatkan guru dan peserta didik. Salah satunya, kebijakan administratif yang wajib dikerjakan guru. Banyaknya beban yang dipikul guru berdampak pada kualitas guru dalam mendidik. Waktu yang seharusnya dimanfaatkan guru untuk mendesain kegiatan pembelajaran yang menggembirakan justru terkuras habis.

Polemik tersebut berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini diperparah dengan rendahnya kualitas literasi peserta didik. Data yang disampaikan Kemenko PMK dari survei Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 2019, Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara. Atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah.

Kurikulum Merdeka
Rendahnya kualitas literasi peserta didik ini juga diperkeruh dengan munculnya pandemi covid 19 yang mengharuskan peserta didik belajar dari rumah. Hingga muncul kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan ini sontak mengagetkan lantaran dunia pendidikan kita belum siap untuk melaksanakan PJJ melalui aplikasi pembelajaran online. Tentunya hal ini menambah dilema dunia pendidikan.

Di tengah situasi ini, Februari 2022 lalu kurikulum merdeka resmi diluncurkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim. Melalui kurikulum merdeka berusaha mewujudkan kegiatan merdeka belajar. Sebagaimana konsep pendidikan merdeka yang digagas Paulo Freire, tokoh pendidikan dari Brazil dalam bukunya yang berjudul 'Pendidikan yang Membebaskan' mengkonfirmasi bahwa merdeka belajar merupakan proses pembelajaran yang membebaskan peserta didik dari segala macam tugas yang memberatkan (penindasan).

Tri Pujiati

Nadiem Makarim memberikan penegasan bahwa kurikulum merdeka ini berupaya mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai fase perkembangannya. Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya sendiri. Tugas guru adalah mengarahkan dan membimbing peserta didik dalam menentukan mata pelajaran yang dipilihnya.



serta didik dari beban administratif yang selama ini dipikulnya. Kedua, kurikulum merdeka bukan sekadar menghangat di atas kertas semata. Kurikulum merdeka harus sampai pada tataran implementasi oleh guru. Jangan hanya mengetahui nama kurikulumnya saja, tapi implementasinya masih menggunakan kurikulum lama. Selain sosialisasi, pelatihan langsung bagi guru juga harus diagendakan.

Ketiga, kurikulum baru merupakan proses penyempurnaan kurikulum lama. Dalam artian, pergantian nama kurikulum yang terus berulang-ulang sebagaimana pergantian menteri harus dipertimbangkan. Alangkah lebih bijak, jika kurikulum pendidikan kita adalah kurikulum pendidikan nasional agar tidak menimbulkan kesan gonta-ganti kurikulum sebagai sebuah tren. Keempat, kurikulum merdeka harus mampu menjadi arah baru dunia pendidikan bukan hanya sarana mengejar ketertinggalan akibat learning loss selama pandemi.

Harapannya, implementasi kurikulum merdeka mampu menjadi media peserta didik dalam menemukan bakat, minat, dan keterampilan yang dimiliki sejak dini. Bagi guru, mengawal keberhasilan kurikulum merdeka dapat dilakukan dengan mengimplementasikannya secara profesional dalam kegiatan pembelajaran di kelas. □

**Tri Pujiati MPdI, Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Reuni itu Silaturahmi, 'Ngrabuk Nyawa'

REVOLUSI teknologi yang luar biasa sehingga menghadirkan aplikasi bernama Facebook dan WhatsApp (WA) memang sangat luar biasa dampaknya. Tidak terbilang teman lama yang bertemu kembali karena berselancar di facebook. Dan pertemuan itu diperlancar kemudian hadirnya WA yang memudahkan komunikasi secara langsung dan personal.

Kemudahan-kemudahan kini membuat makin banyak terjadi kegiatan reuni. Kita kemudian menjalin pelbagai pertemuan reuui mulai SD fi SMA bahkan perguruan tinggi dan juga reuni warga kos selama kuliah.

Belum yang lansia kemudian membuat reuni pensiunan, reuni mantan aktivis ormas, LSM dan tentu banyak lainnya. Sangat menggembirakan sekali. Karena reuni itu silaturahmi, upaya *ngrabuk nyawa* agar panjang usia dengan sehat.

Jangan kotori reuni dengan hal-hal kecil seperti pertemuan silaturahmi karena ketidaksepahaman, pemaksaan keinginan apalagi sampai perselingkuhan. Yuk... . Sekarang pandemi sudah mereda, kembali dibuka kegiatan reuni. Biar sehat jiwa raga. □

Prasetya, Mertoyudan Magelang

'Simpangan Toleransi' di Jalan Magelang

DI BAWAH fly-over di jalan Magelang terjadi lingkaran atau putaran bagi kendaraan. Jalan raya di kawaasnt tersebut sangat ramai sekali, karena ke Utara menuju Magelang, ke Selatan masuk ke Kota Yogya, bila ke Timur dan Barat langsung masuk ke ringroad. Namun kawasan tersebut tetap tanpa lalu lintas yang mengatur kendaraan di jalan.

Iseng-iseng saya bertanya kepada pengemudi yang mengantar, apakah tidak ribet Ketika harus memutar di sini? Karena tidak ada lampu pengatur

lalu lintas? Jawabnya sungguh di luar dugaan. Menurutnya, kalau ada lampu pengatur lalu lintas malah ribet. Sehingga di sini toleransi antar-pengguna jalan lebih bermanfaat. Jadi terpicu, mengapa tidak disebut saja sebagai Simpang Toleransi?

Karena saya akhirnya merasakan sendiri, saat memutar. Karena pengendara motor dan mobil temyata saling menghormati, saling memberi jalan. Semoga ini bisa berlanjut selamanya. □

Nungki, 08129904xxxx

Komunikasi Publik Candi Borobudur

PEMERINTAH melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memutuskan menunda rencana kenaikan tiket ke Candi Borobudur, hingga satu tahun ke depan (KR, 13/6). Dari sini muncul pertanyaan, apakah keputusan ini merupakan penundaan semata atau akan ada perubahan formula pengambilan keputusan dan komunikasi publiknya? Apa makna yang bisa dipelajari dari kasus ini dalam perspektif komunikasi publik?

Kontroversi tiket masuk Candi Borobudur menunjukkan dua hal. Pertama, dilema posisi pemerintah antara berpihak pada kepentingan ekonomi pariwisata dalam tata kelola Borobudur dengan aspek sosial konservasi candi dan penataan perilaku pengunjung. Kedua, fenomena solidaritas digital, rasa memiliki dan kepedulian masyarakat terhadap candi yang terefleksi dari kontroversi di media digital. Aspek kedua ini merupakan modal sosial yang penting dalam pengelolaan, pelestarian dan aktivasi candi beserta lingkungannya di masa depan.

Permasalahn, bagaimana agar keputusan tiket masuk dan reformasi tata kelola Borobudur di masa depan bisa mempertemukan dua dimensi ini?

Dipicu

Dari sisi praktek komunikasi publik, kontroversi atas rencana pemberlakuan tarif baru masuk Candi Borobudur dipicu oleh tiga hal. Pertama, aspek substansi pesan yang tidak koheren dan kontradiktif. Pemerintah menyatakan akan ada kenaikan tiket dengan tujuan mengurangi angka pengunjung harian, konservasi atas fisik candi, sekaligus penataan perilaku pengunjung. Ketiga tujuan ini tampak mulia dan strategis bagi keberlanjutan candi, namun pernyataan solusi yang dipilih dengan menaikkan harga tiket masuk tampak tidak selaras atau

Masduki

melompat. Penonjolan kenaikan tiket sebagai solusi atas krisis tata kelola wisata Candi tampak mewakili satu sisi kepentingan saja: pendapatan ekonomi. Borobudur dilihat sebagai asset dan sumber ekonomi. Solusi menaikkan tiket cenderung melompat dari problem mendasar yang dihadapi: krisis fisik Candi dan perilaku pengunjung.

Kedua, aspek komunikator/juru bicara penyampaian kebijakan. Penyampaian pesan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan, bukan oleh Menteri Pariwisata atau tokoh masyarakat terkait (agamawan, tokoh publik lokal) menimbulkan kebingungan atas siapa otoritas Borobudur dan korporasi pengelola situs ini. Upaya Luhut B Panjaitan menjadi juru bicara pengelola candi berlawanan dengan persepsi umum publik bahwa urusan Borobudur ada di pundak kepariwisataan, tokoh adat dan otoritas agama.

Ketiga aspek pilihan media. Penggunaan media sosial Twitter dalam menyampaikan informasi kebijakan publik tidak memberikan pesan kuat kepada publik bahwa soal tiket candi sebagai kebijakan yang resmi. Penggunaan twitter menempatkan kebijakan ini semata sebatas percakapan informal.

Diskriminatif

Terakhir, terdapat ibias kelas menengah dalam usulan tiket Candi Borobudur. Logika tiket 750 ribu yang hanya bisa diakses kelas menengah ke atas menimbulkan asumsi bahwa kerusakan fisik Candi hanya disebabkan pengunjung

kelas menengah ke bawah. Padahal asumsi bahwa kelas menengah bisa lebih tertib dan peduli konservasi belum terbukti. Terdapat pola pikir kebijakan yang diskriminatif disertai logika kapitalisasi candi yang mengesklusif pendudukan miskin. Jadi, untuk siapa Candi Borobudur?

Lebih jauh, faktor ekonomi ketidakmampuan beli tiket dianggap dapat mengurangi kedatangan pengunjung dari sekitar 8 ribu orang perhari menjadi hanya 1,5 ribu. Asumsi ini menegasi faktor teknologi dan regulasi sebagai instrumen yang lebih efisien dalam membatasi akses pengunjung. Belajar dari kontroversi ini, diperlukan cara pandang yang holistik atas Borobudur. Model pengambilan keputusan dan komunikasi publik yang partisipatif terkait isu Borobudur adalah kunci agar kejadian serupa tidak terulang lagi. □

**Masduki, Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.*

Pojok KR

Bermain senapan angin, teman tewas.
-- Senapan angin bukan untuk main tembak-tembakan.

Ideologi radikalisme menular seperti Covid-19.
-- Perlu vaksinasi kebangsaan.

Kapolri minta budayakan bersepeda.
-- Perlu diimbangi aturan di jalan raya.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirnon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lempersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujijanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Wakil : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd, Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.